



**Laporan Capaian Tri Wulan I
Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Hulu Sungai Selatan
Tahun 2018**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Jl. Pangeran Antasari No. 1 Kandangan Kode Pos 71211
Telp. (0517)22852

KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat dan karunia Allah SWT semata maka kami dapat menyusun Laporan Capaian Kinerja Tri Wulan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Laporan ini merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan laporan kinerja ini merupakan analisis kinerja capaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Laporan Capaian Tri Wulan yang kami susun ini diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 dan dapat memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan kinerja yang lebih baik di tahun berikutnya.

Kandangan, Maret 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Hulu Sungai Selatan,



Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina Tk.I

NIP.19660722 199302 2006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.3. Isu Strategis	3
1.4. Dasar Hukum	3
II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Perencanaan Strategis	4
2.2. Indikator Kinerja Utama	7
2.3. Perjanjian Kinerja	7
III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama	9
3.2. Pengukuran	10
3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	13
3.4. Akuntabilitas Keuangan	14
IV. PENUTUP	16
LAMPIRAN : Laporan Capaian Triwulan I	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Atas dasar tekad dan semangat untuk perwujudan good governance itu maka beberapa tugas dan tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dirasakan semakin berat, karena aparatur daerah dituntut untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Dalam rangka pemenuhan atas tuntutan itu, maka diperlukan pengembangan dan penetapan sistem serta prosedur kerja yang cepat, tepat, jelas dan nyata serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga penyelenggaraan tugas-tugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan harus bisa berlangsung secara berdayaguna dan berhasil guna.

Selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan salah satu keberhasilan dalam melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tersebut maka disusun Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2018 yang didalamnya berisi konstelasi perencanaan strategik dan implementasinya serta tolok ukur keberhasilan berbagai indikator yang telah ditetapkan guna peningkatan dalam pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Harapan yang diinginkan dapat menjadi umpan balik dalam rangka pemacu perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan di tahun mendatang.

1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 72 Tahun 2016 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman Modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas.

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Perumusan Kebijakan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal serta pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu.
3. Pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal.
4. Koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian
5. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal.
6. Evaluasi dan pelaporan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem

informasi penanaman modal.

1.3 Isu Strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD, Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, implikasi RT/RW bagi pelayanan SKPD dan identifikasi masalah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai isu strategis yaitu sebagai berikut :

1. Tingkat investasi yang masih rendah;
2. Kurang puasnya masyarakat terhadap pelayanan perizinan;
3. Lamanya proses pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
4. Rendahnya akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Peraturan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12) ;
- e. Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja, suatu organisasi mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Di dalam suatu perencanaan strategis terdapat visi dan misi organisasi yang akan dicapai dalam suatu periode. Adapun visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut :

1) Visi

“Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif dengan Mengedepankan Pelayanan Prima Terpadu Satu Pintu”

2) Misi

1. Meningkatkan investasi penanaman modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
3. Meningkatkan kecepatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas PM PTSP.

3) Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dan pencapaian target - target ini merupakan ukuran keberhasilan kinerja suatu organisasi, adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan investasi penanaman modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- b. Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- c. Meningkatkan kecepatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- d. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas PM PTSP.

b. Sasaran

Adapun sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur sebagaimana penjabaran berikut :

- a. Meningkatnya investasi penanaman modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. Meningkatnya kepuasan masyarakat pada pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- c. Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- d. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PM PTSP.

Hubungan antara tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Hubungan Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Meningkatkan investasi di Kab. Hulu Sungai Selatan	Meningkatnya investasi di Kab. Hulu Sungai Selatan	Jumlah investasi penanaman modal di Kab. Hulu Sungai Selatan

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN
1	2	3	4
2	Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu satu pintu	Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu satu pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan perizinan. Persentase layanan izin tepat waktu sesuai Standar Operasional Procedure (SOP) Jumlah pemenuhan terhadap skor tingkat kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman.
3	Meningkatkan kecepatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu	Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu	Rata-rata hari penyelesaian perizinan. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
4	Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas PM PTSP	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas PM PTSP	Nilai hasil evaluasi AKIP. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti.

4) Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran, terdiri dari kegiatan :
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - Penyebarluasan informasi tugas pokok dan fungsi SKPD
 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - Penyediaan alat tulis kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyediaan makanan dan minuman
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis lainnya
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari kegiatan :
 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari kegiatan :
 - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi :

- Penyelenggaraan Pameran Investasi

Pembangunan system informasi pelayanan perizinan

Kajian potensi unggulan daerah dalam upaya sistinformasi

Penanaman Modal

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra. Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan Pemilihan Indikator	Formulasi / Penjelasan	Penanggung jawab	Sumber Data						
1	2	3	4	5	6	7						
1	Meningkatnya Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Jumlah Investasi Penanaman Modal di Kab. HSS	saat ini tingkat investasi di Kab. HSS masih rendah (th 2015 persentase peningkatan investasi tercatat 0,23%) hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain kurangnya promosi keunggulan daerah, potensi keunggulan yang ada masih bersifat komparatif	jumlah investasi penanaman modal	Bidang PM							
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu satu pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang pelayanan peizinan	Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan di samping data IKM akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan perizinan yg masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan.	<p>Hasil survey IKM satu tahun yang diikuti minimal 50% penerima layanan dengan membandingkan total dari nilai persepsi per variable dengan total pariable yg terisi dikalikan dengan nilai penimbang. Terdapat 9 variable sesuai acuan KEP MENPAN No : 14 Tahun 2016.</p> <p>UNSUR PELAYANAN</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Pelayanan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kemudahan prosedur pelayanan</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kecepatan waktu pelayanan</td> </tr> </table>	1	Pelayanan	2	Kemudahan prosedur pelayanan	3	Kecepatan waktu pelayanan	Bidang PTSP	
1	Pelayanan											
2	Kemudahan prosedur pelayanan											
3	Kecepatan waktu pelayanan											

				4	Kesesuaian biaya pelayanan		
				5	Kepastian produk layanan		
				6	Kompetensi petugas layanan		
				7	Perilaku petugas layanan		
				8	Kejelasan maklumat pelayanan		
				9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan pelayanan		
		Persentase layanan izin tepat waktu sesuai Standart Operasional Procedure (SOP)	izin yang dikeluarkan sesuai (SOP)	Jumlah izn sesuai SOP : jenis Izin x 100		Bidang PTSP	Bidang PTSP
			No	Jenis izin	waktu penyel esaian (hari)		
			1	Izin Usaha Industri (IUI)	1		
			2	Izin Usaha Perdagangan (IUP)	1		
			3	Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)	1		
			4	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	1		
			5	Izin Optikal	2		
			6	Izin Balai Pengobatan	2		
			7	Izin Balai Kesehatan Ibu dan Anak	3		
			8	Izin Apotik	2		
			9	Izin Toko Obat	3		
			10	Izin Operasional Rumah Sakit Bersalin	3		

			11	Izin Usaha Jasa Konstruksi	2			
			12	Izin Usaha Toko Modern	2			
			13	Izin Lokasi	3			
			14	izin domisili	1			
			15	izin gangguan perdagangan	1			
			16	izin gangguan industri	2			
			17	izin gangguan pengolahan makanan dan minuman	2			
			18	izin gangguan praktek dokter	2			
			19	izin gangguan praktek dokter spesialis	2			
			20	izin gangguan praktek dokter gigi	2			
			21	izin gangguan praktek dokter gigi spesialis	2			
			22	izin gangguan praktek bidan mandiri	2			
			23	izin gangguan praktek perawat	2			
			24	izin gangguan apotek	2			
			25	izin gangguan toko obat	2			
			26	izin gangguan optikal	2			
			27	izin gangguan rumah sakit swasta	2			
			28	izin gangguan balai pengobatan/ klinik pengobatan	2			
			29	izin gangguan balai pengobatan kesejahteraan ibu dan anak	2			

			30	izin gangguan laboratorium sederhana	2			
			31	izin gangguan pengobatan tradisional	2			
			32	izin gangguan warnet	2			
			33	izin gangguan game online	1			
			34	izin gangguan rumah makan	2			
			35	izin gangguan warung makan	2			
			36	izin gangguan restoran	1			
			37	izin gangguan kafe	2			
			38	izin gangguan salon kecantikan	2			
			39	izin gangguan tempat olahraga	2			
			40	izin gangguan pusat pelatihan / kursus	2			
			41	izin gangguan biro perjalanan	2			
			42	izin gangguan hotel	2			
			43	izin gangguan penginapan/home stay	2			
			44	izin gangguan pangkalan LPG	2			
			45	izin gangguan minyak tanah	2			
			46	izin gangguan rumah parkir	2			
			47	izin gangguan las	2			
			48	izin gangguan bengkel dan servis kendaraan	1			
			49	izin gangguan TV kabel	1			
			50	izin trayek	3			

			51	izin mendirikan bangunan	7			
			52	izin pemasangan reklame	2			
		Jumlah pemenuhan terhadap skor tingkat kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman	Nilai kepatuhan terhadap pelayanan publik versi ombudsman ada 9 kriteria, terpenuhinya nilai tersebut menunjukkan bahwa kinerja Dinas PM PTSP sesuai dengan yang diharapkan masyarakat terutama dari sarana dan prasaran yang tersedia.			Peraturan Ombudsman RI No. 17 tahun 2015 tentang penelitian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik		
			NO	Periabel Penilaian	Kateg ori	Komponen Indikator	Bobot	
			1	Standar Pelayanan	Utama	Persyaratan	6,0	
		Sistem mekanisme dan prosedur				6,0		
		Produk pelayanan				6,0		
		Jangka waktu penyelesaian				12,0		
			2	Maklumat Layanan	Utama	Ketersediaan Maklumat Pelayanan	12,0	
			3	Sistem Informasi Pelayanan	Utama	Ketersediaan informasi Pelayanan Publik Elektronik atau Nonelektronik (booklet,pamflet, website,monitor, televisi,dll)	12,0	
			4	Sarana dan Prasarana Fasilitas	Utama	Ketersediaan ruang tunggu	3,0	
		Ketersediaan toilet untuk pengguna layanan				2,0		
		Ketersediaan loket/meja pelayanan				3,0		

				5	Pelayanan Khusus	Utama	Ketersediaan sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus pemandu,toilet khusus,ruang menyusui dll	2,0		
				6	Pengelolaan pengaduan	Utama	Ketersediaan pelayanan khusus bagi pengguna layanan	2,0		
							Ketersediaan sarana pengaduan (sms/telpon/fax/email,dll)	5,0		
							Ketersediaan informasi prosedur dan tatacara penyampaian	3,0		
							Ketersediaan pejabat/petugas pengelola pengaduan	5,0		
				7	Penilaian kinerja	Utama	Ketersediaan sarana pengukuran kepuasan pelanggan	2,5		
				8	Visi,Misi dan Metro Pelayanan	Tambahan	Ketersediaan Visi dan Misi Pelayanan	2,0		
							Ketersediaan Motto Pelayanan	2,0		
				9	Atribut	Tambahan	Ketersediaan Petugas penyelenggara menggunakan ID Card	2,5		
<p>Hasil penilaian kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, dengan nilai dan kategorisasi sebagai berikut</p>										

				a. Nilai 81 s.d 100 zona hijau dengan predikat Kepatuhan Tinggi		
				b. Nilai 51 s.d 80 zona kuning dengan predikat kepatuan sedang		
				c. Nilai 0 s.d 50 zona merah dengan predikat kepatuhan rendah		
3	Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu	Rata-rata hari proses perizinan	Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan menunjukkan bahwa ada peningkatan kinerja dari seluruh SDM yang ada di Dinas PM PTSP	jumlah hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan izin : jumlah izin yang terbit	Bidang PTSP	Bidang PTSP
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	Jumlah pengaduan masyarakat yang di selesaikan atau ditindak lanjuti	jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti : jumlah pengaduan yang masuk x 100	Bidang PTSP	Bidang PTSP
4	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas PM PTSP	Nilai evaluasi AKIP	sebagai salah satu hasil kinerja SKPD	nilai evaluasi Inspektorat	Sekretariat Dinas PM PTSP	Sekretariat Dinas PM PTSP
		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti	Dalam rangka pembenahan administrasi program dan keuangan pada SKPD	temuan BPK/ Inspektorat yang ditindak lanjuti	Sekretariat Dinas PM PTSP	Sekretariat Dinas PM PTSP

Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Berdasarkan perencanaan strategis terkait sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang harus dicapai, maka pada Tahun 2018 target pencapaian kinerja yang ingin dicapai sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya investasi penanaman modal di Kab.HSS	Persentase Jumlah Investasi Penanaman Modal di Kab. HSS	230M	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Penyelenggaraan Pameran Investasi	111.550.000,00
					Kajian Potensi Unggulan Daerah dalam Upaya Sistem Informasi Penanaman Modal	76.687.500,00
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu satu pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang pelayanan perizinan	81			Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan
		Persentase layanan izin tepat waktu sesuai Standart Operasional Prosedure (SOP)	100%			
		Jumlah pemenuhan terhadap Skor tingkat kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman	85 (zona hijau)			

3	Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu	Rata-rata hari proses perizinan	2 Hari			
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%			
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas PM PTSP	Nilai Hasil evaluasi AKIP	BB	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5,832,000.00
		Prosentasi Temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%			
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	830,485,000.00
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	53,950,000.00
				Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	24,800,000.00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan tahapan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2018 disusun dengan mengukur capaian kinerja atas sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja ini. Metode pengukuran yang dilaksanakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi, serta tindakan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang (*performance improvement*). Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi telah mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam mengukur keberhasilan kinerja sasaran, indikator yang dipakai dapat berupa indikator absolut di mana indikator tersebut melekat pada masing-masing kegiatan yaitu : indikator kinerja *input*, indikator kinerja *output* dan indikator kinerja *outcome*, atau merupakan dampak makro (*outcomes, benefit, impact*) dari beberapa kegiatan yang dilakukan. Capaian kinerja sasaran diukur dengan membandingkan capaian kinerja *outcome* yang dihasilkan dengan rencana pada masing-masing kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja indikator sasaran.

Indikator kinerja *input* terdiri dari besarnya dana yang digunakan dan pemakaian SDM. Indikator kinerja *output* berupa hasil yang diperoleh begitu kegiatan selesai dilaksanakan. Sedangkan indikator kinerja *outcome* berupa manfaat yang diperoleh dari berfungsinya output yang dapat di ukur dalam jangka pendek.

1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) cenderung lebih dititikberatkan sejauh mana program dan kegiatan telah membawa manfaat bagi masyarakat, Pemerintah maupun *stakeholder* lainnya, dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat pencapaian IKU pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Hulu Sungai Selatan Triwulan I Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian IKU Pada Triwulan I Tahun Anggaran 2018

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI	CAPAIAN
1	Jumlah investasi penanaman modal di Kab. HSS	M	60 (PMDN)	32,8	14,26 %
			130 (PMA)	-	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)bidang pelayanan perizinan.	Indeks	81	88,64	88,64
3	Persentase layanan izin tepat waktu sesuai standar operasional procedure (SOP)	%	100	100	100
4	Jumlah pemenuhan skor tingkat kepatuhan pelayanan public versi ombustman	Nilai	85 (zona hijau)	79 (zona kuning)	79 (zona kuning)
5	Rata-rata hari proses perizinan.	Hari	2 hari	0,18 Hari	0,18 hari
6	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti.	%	100	-	-
7	Nilai hasil evaluasi AKIP	Kriteria	BB	-	-
8	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	100	-	-

1.2 Pengukuran

Tabel 3.2
Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator Kinerja Utama	Perhitungan Indikator	Formulasi
1	Jumlah investasi penanaman modal di Kab. HSS	<p><i>Makna Indikator :</i> Di Kab. HSS investasi PM sangat rendah.</p> <p><i>Alasan Pemilihan Indikator :</i> Tingkat investasi di Kab. HSS pada tahun 2015 tercatat 0,23 % Adapun penyebabnya antara lain Kurangnya promosi keunggulan daerah, potensi keunggulan yang ada masih bersifat komparatif.</p> <p><i>Cara Perhitungan :</i> Jumlah investasi penanaman modal.</p>	
2	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) bidang pelayanan perizinan.	<p><i>Makna Indikator :</i> Dinas PM PTSP kualitas pelayanan perizinan masih perlu perbaikan.</p> <p><i>Alasan Pemilihan Indikator :</i> Sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan perizinan perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk menilai guna mendorong perbaikan kualitas pelayanan.</p> <p><i>Cara Perhitungan :</i> Hasil survey IKM 1 tahun yang diikuti minimal 50 % penerima layanan dengan membandingkan total dari nilai persepsi per variable dengan total variable yang terisi X nilai penimbang 9 (Sembilan) variable sesuai KEP MENPAN No.14 Th 2016</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan 2. Kemudahan prosedur pelayanan 3. Kecepatan waktu pelayanan 4. Kesesuaian biaya pelayanan 5. Kepastian produk layanan 6. Kompetensi petugas layanan 7. Perilaku petugas layanan 8. Kejelasan maklumat pelayanan 9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan pelayanan. 	

3	Persentase layanan izin tepat waktu sesuai SOP	<p><i>Makna Indikator :</i> Penyelesaian perizinan tepat waktu dan sesuai SOP. <i>Alasan Pemilihan Indikator :</i> Waktu penyelesaian izin yang dikeluarkan sesuai SOP = 100%. <i>Cara Perhitungan :</i> $\frac{\sum \text{Izin sesuai SOP}}{\text{Jenis izin}} \times 100 \%$</p>	
4	Jumlah pemenuhan terhadap skor tingkat kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman	<p><i>Makna Indikator :</i> Dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat bahwa kinerja Dinas PM PTSP agar mematuhi peraturan ombostmen. <i>Alasan Pemilihan Indikator :</i> Nilai kepatuhan terhadap pelayanan publik versi ombustman agar terpenuhi harapan masyarakat terutama sarana dan prasarana. <i>Cara Perhitungan :</i> Peraturan Ombostman RI No. 17 tahun 2015 tentang penelitian kepatuhan terhadap standar.; Dari hasil 9 kriteria hasil penilaian kepatuhan pada pasal 12 dengan nilai dan kategori sbb a. Nilai 81s.d 100 zona hijau, Predikat kepatuhan tinggi b. Nilai 51 s.d 80zona kuning, Predikat kepatuhan sedang c. Nilai 0 s.d 50 zona merah, Predikat kepatuhan rendah.</p>	
5	Rata-rata hari proses perizinan.	<p><i>Makna Indikator :</i> Permasalahan isu strategis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi adalah kurang cepatnya penyelesaian izin. <i>Alasan Pemilihan Indikator :</i> Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan menunjukkan adanya peningkatan kinerja dari seluruh SDM yang ada di Dinas PM PTSP. <i>Cara Perhitungan :</i> $\frac{\sum \text{hari yg dibutuhkan}}{\sum \text{izin yg diterbitkan}} \times \text{Penyelesaian izin}$</p>	
6	1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	<p><i>Makna Indikator :</i> Setiap pengaduan yang disampaikan akan berdampak terhadap perbaikan pelayanan. <i>Alasan Pemilihan Indikator :</i> Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan atau ditindaklanjuti.</p>	

		<i>Cara Perhitungan :</i> $\frac{\sum \text{Pengaduan yg d TLx}}{\sum \text{Pengaduan yg masuk}} \times 100 \%$	
7	1. Nilai hasil Evaluasi AKIP	<i>Makna Indikator :</i> Dinas PM PTSP pada tatanan akuntabilitas kinerja masih rendah. <i>Alasan Pemilihan Indikator :</i> Sebagai salah satu hasil kinerja OPD. <i>Cara Perhitungan :</i> Hasil evaluasi Inspektorat.	
8	2. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak Lanjuti.	<i>Makna Indikator:</i> OPD bertanggungjawab atas temuan yang menimbulkan kerugian Negara dan menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi tepat waktu. <i>Alasan Pemilihan Indikator :</i> Dalam rangka pembenahan administrasi program dan keuangan pada OPD <i>Cara Perhitungan :</i> Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti.	

1.3 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan formulir tahapan capaian Perjanjian Kinerja (PK) Triwulan I Tahun 2018, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Namun pengukuran itu saja tidak cukup tanpa tahu apa deskripsi dari semua kondisi itu, kondisi-kondisi tersebut perlu dianalisis dari pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan agar dapat diketahui hubungan permasalahannya untuk diidentifikasi sebagai sebab akibat berupa faktor-faktor yang mempengaruhinya, mana yang menjadi hambatan dan kendala untuk dijadikan *feed back* bagi

perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada putaran atau periode waktu berikutnya.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Triwulan I Tahun Anggaran 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

1.) **SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatkan investasi penanaman modal di Kab.HSS**

Tabel 3.3

Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2018	Realisasi TW 1	Capaian Kinerja %	Catatan
1	Jumlah investasi penanaman modal di Kab. HSS	M	60 (PMDN)	32,8	14,26	
			130 (PMA)	-		

Pencapaian sasaran strategis 1 yaitu meningkatnya investaasi penanaman modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilihat dari indikator kinerja sasaran jumlah investasi penanaman modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Jumlah investasi penanaman modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada triwulan I adalah sebesar Rp.32,8M, capaian tersebut diperoleh dari Penanaman Modal Dalam Daerah (PMDN).

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Dibandingkan dengan Target Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET THN 2018	REALISASI TW I	CAPAIAN KINERJA
Jumlah investasi penanaman modal di Kab. HSS	M	230	32,8	Belum tercapai

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja pada sasaran 1 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.5

Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 1

Sasaran	Indikator Kegiatan	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Meningkatnya investasi penanaman modal di Kab.HSS		<i>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investas</i>		
	Jumlah investasi penanaman modal di Kab. HSS	- Penyelenggaraan pameran investasi	111.550.000	-
		- Kajian potensi unggulan daerah dalam upaya system informasi penanaman modal	4.650.000	-
J U M L A H			59.700.000	

2.) **SASARAN STRATEGIS 2** **Meningkatnya kepuasan masyarakat pada pelayanan perizinan terpadu .satu pintu.**

Tabel 3.6

Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2018	Realisasi TW 1	Capaian Kinerja %	Catatan
1	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) bidang pelayanan perizinan	Indeks	81	88,64	88,64	Tercapai
2	Persentase layanan izin tepat waktu sesuai SOP	%	100	100	100	Tercapai

3	Jumlah pemenuhan terhadap skor tingkat kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman	Nilai	85 (zona hijau)	79 (kuning)		Belum Tercapai
---	---	-------	-----------------	-------------	--	----------------

Pencapaian sasaran strategis 2 yaitu Meningkatnya kepuasan masyarakat pada pelayanan perizinan terpadu satu pintu dilihat dari 3 indikator kinerja sasaran yaitu:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang pelayanan perizinan.

Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan perizinan pada triwulan I sebesar 88,64 angka ini diperoleh dari hasil survey IKM satu tahun yang lalu yang diambil dari 50 % penerima

2. Persentase layanan izin tepat waktu sesuai SOP

- Persentase layanan izin tepat waktu sesuai Standar Operasional Prosedur pada triwulan I ini sebesar 100 % karena jumlah izin yang masuk sesuai dengan jumlah izin yang diterbitkan (untuk yang memerlukan rekomendasi dinas teknis diluar SOP/SOP tersendiri dari dinas teknis)

3. Jumlah pemenuhan terhadap skor tingkat kepatuhan pelayanan public versi ombudsman.

- Jumlah pemenuhan terhadap skor tingkat kepatuhan pelayanan publik versi ombustman pada triwulan I masuk kategori zona kuning yaitu 79 hal ini disebabkan salah satu komponen indikator yang belum terpenuhi yaitu ketersediaan sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus pemandu.

Tabel 3.7

**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2
Dibandingkan dengan Target Tahun 2018**

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET THN 2018	REALISASI TW I	CAPAIAN KINERJA
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang pelayanan perizinan	%	81	88,64	Tercapai
Persentasi layanan izin tepat waktu sesuai Standart Operasional Procedure (SOP)	%	100	100	Tercapai

Jumlah pemenuhan terhadap Skor tingkat kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman	nilai	85	79 (kuning)	Belum tercapai

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja pada sasaran 2 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.8

Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 2

Sasaran	Indikator Kegiatan	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Meningkatnya kepuasan masyarakat pada pelayanan perizinan terpadu satu pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang pelayanan perizinan	<i>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investas</i>		
	Persentasi layanan izin tepat waktu sesuai Standart Operasional Prosedure (SOP)	- Pembangunan system informasi pelayanan perizinan	244.522.500	84.500.000
	Jumlah pemenuhan terhadap Skor tingkat kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman			
J U M L A H			244.522.500	84.500.000

3.) **SASARAN STRATEGIS 3** **Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu**

Tabel 3.9

Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2018	Realisasi TW 1	Capaian Kinerja %	Catatan
1	Rata-rata hari proses perizinan.	hari	2	0,18	0,18	Tercapai
2	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	%	100	100	100	Tercapai

Pencapaian sasaran strategis 3 yaitu Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dilihat dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Rata rata hari proses perizinan
 - Rata-rata hari proses perizinan pada triwulan I 0,18 hal ini dikarenakan meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan dengan menggunakan system pelayanan perizinan secara online.
2. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
 - Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti pada triwulan I 100% dikarenakan jumlah pengaduan yang diterima dapat diselesaikan dan ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3
Dibandingkan dengan Target Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET THN 2018	REALISASI TW I	CAPAIAN KINERJA
Rata-rata hari proses perizinan.	Hari	2	0,18	Tercapai
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	%	100	100	Tercapai

Tabel 3.11
Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 3

Sasaran	Indikator Kegiatan	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu	Rata-rata hari proses perizinan.	<i>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investas</i>		
	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.			
J U M L A H				

6.) **SASARAN STRATEGIS 4** Meningkatkan akuntabilitas kinerja

Tabel 3.12

Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2018	Realisasi TW 1	Capaian Kinerja %	Catatan
1	Indikator nilai hasil evaluasi AKIP	Nilai	BB	0	0	
2	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	100	-	-	

Pencapaian sasaran strategis 4 yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja dilihat dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Indikator nilai hasil evaluasi AKIP

Nilai hasil evaluasi AKIP SKPD menjadi indikator yang cukup menentukan terhadap kualitas kinerja SKPD, karena semakin baik nilai evaluasi AKIP SKPD menunjukkan bahwa pola manajemen dalam suatu organisasi telah berjalan dengan baik dari mulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dimana seluruh unsur tersebut menentukan tingkat keberhasilan SKPD dalam mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi AKIP SKPD setiap tahunnya dilaksanakan oleh Inspektorat Kab.HSS Target nilai evaluasi AKIP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. HSS yang ditetapkan pada Tahun 2018 kategori BB.

Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya nilai evaluasi AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kab. HSS akan terus meningkat sehingga dapat menunjang nilai evaluasi AKIP Pemerintah Kab. HSS untuk memperoleh nilai A.

2. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

Temuan atas hasil pemeriksaan BPK atas laporan pertanggungjawaban keuangan harus selalu ditindaklanjuti sehingga target yang ditetapkan untuk indikator ini harus 100%.

Selain persentase tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK, diharapkan jumlah temuan dari hasil pemeriksaan tersebut setiap tahun mengalami pengurangan atau bahkan tidak ada sehingga dapat predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Kab. HSS dapat diperoleh.

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4
Dibandingkan dengan Target Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET THN 2018	REALISASI TW I	CAPAIAN KINERJA
Indikator nilai hasil evaluasi AKIP	Nilai	BB	-	-
Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	100	-	-

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja pada sasaran 4 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.32
Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 4

Sasaran	Indikator Kegiatan	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai hasil evaluasi AKIP	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5,532,000	1.200.000
	Jumlah Laporan Keuangan diselesaikan tepat waktu			
	temuan BPK /inspektorat yang ditindaklanjuti			
	Jumlah administrasi kepegawaian diselesaikan tepat waktu	Pelayanan Administrasi Perkantoran	595.147.000	106.317.362
	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik		13.550,000	4.000.000
	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	91.450,000	-

	Kondisi Mobil Dinas Operasional laik jalan	Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.250,000	359.500
	Kendaraan Dinas Operasional laik jalan		24.800.000	4.200.000
J U M L A H			733.729.000	115.717.362

1.4 Akuntabilitas Keuangan

Pada bagian ini akan diuraikan pagu anggaran dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. Di dalamnya terdapat alokasi anggaran, realisasi keuangan, persentasi capaian dan sisa anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan Triwulan I Tahun Anggaran 2018 yang diambil dari Laporan Fisik dan Keuangan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.33

**Alokasi dan Realisasi Keuangan
Triwulan I Tahun 2018**

Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi
2	3	4
<i>Program Pelayanan Administrasi dan Perkantoran</i>	<i>611.947.000</i>	<i>110.676.862</i>
Penyediaan jasa surat menyurat	3.200.000	999.500
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	78.000.000	13.130.322
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.250.000	359.500
Penyebarluasan informasi tugas pokok dan fungsi SKPD	11.000.000	-
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	13.550.000	4.000.000
Penyediaan alat tulis kantor	37.314.750	9.890.300
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.940.000	2.091.600
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.948.750	-
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	149.843.500	927.500
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.400.000	340.000

Penyediaan makanan dan minuman	11.600.000	900.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	225.000.000	64.058.140
Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis lainnya	29.400.000	6.600.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	22.500.000	7.380.000
<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apatur</i>	<i>116.250.000</i>	<i>4.200.000</i>
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	91.450.000	-
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	24.800.000	4.200.000
<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	<i>5.832.000</i>	<i>1.200.000</i>
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.832.000	1.200.000
<i>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</i>	<i>432.760.000</i>	<i>84.500.000</i>
Penyelenggaraan pameran investasi	111.550.000	-
Pembangunan system informasi pelayanan perizinan	244.522.500	84.500.000
Kajian potensi unggulan daerah dalam upaya system informasi penanaman modal	76.687.500,-	-
JUMLAH	1.166.489.000	200.576.862

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penyerapan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Triwulan I Rp. 200.576.862,00 atau 17,19 %.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 sebagai bentuk pertanggung jawaban dari rangkaian rencana kerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja sebagai wujud visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan pelaksanaan Tahun 2018 yang dapat mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari sasaran yang ditetapkan.

Adapun masalah ataupun hambatan yang dijumpai antara lain :

- a. Kurangnya/keterbatasan jumlah sumberdaya manusia.
- b. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan perizinan.
- c. Masih belum terkoordinasinya data tentang inventarisasi pelayanan perizinan
- d. Kurangnya kemampuan dalam mengkoordinir dinas/instansi terkait.

Upaya untuk mengatasi permasalahan/hambatan tersebut dilakukan antara lain melalui :

- a. Sudah diupayakan untuk penambahan sumberdaya aparatur pada masing- masing bidang.
- b. Telah diupayakan kegiatan pengadaan sarana komputer pada Tahun 2018 untuk menunjang kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- c. Telah diupayakan untuk memintadata -data tentang perizinan dari Instansi yang berkaitan.
- d. Telah diupayakan untuk melakukan pertemuan dalam Rapat teknis perizinan

Demikian Laporan Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018, selanjutnya laporan ini dapat dijadikan bahan untuk peningkatan dan penyempurnaan layanan yang berkepentingan.

Kandangan, Maret 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Hulu Sungai Selatan,



Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina Tk.I

NIP.196607221993022006

**TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2018 PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Meningkatnya investasi penanaman modal di Kab.HSS	1 Jumlah Investasi Penanaman Modal di Kab. HSS	230	M	Triwulan I	32,8		Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Penyelenggaraan Pameran dan Investasi	111,500,000	-
									Kajian potensi unggulan daerah dalam upaya sistem informasi penanaman modal	76,687,500	-
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu satu pintu	2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang pelayanan perizinan	81	indeks	Triwulan I	88,64			Pembangunan sistem informasi pelayanan perizinan	244,522,500	84,500,000
		3 Persentasi layanan izin tepat waktu sesuai Standart Operasional Prosedure (SOP)	100	%	Triwulan I	100					
		4 Jumlah pemenuhan terhadap Skor tingkat kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman	85	zona hijau	Triwulan I	79					
3	Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu	5 Rata-rata hari proses perizinan	2	hari	Triwulan I	0,18					
		6 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	%	Triwulan I	100					
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas PM PTSP	7 Nilai Hasil evaluasi AKIP	BB	Kriteria	Triwulan I	-		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5,532,000	1,200,000
		8 Prosentasi Temuan BPK / Inspektorat Yang Ditindaklanjuti	100	%	Triwulan I	-		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Administrasi Perkantoran	611,947,000	110,676,862
									Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	91,450,000	-
									Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	24,800,000	4,200,000

Kandangan, Maret 2018




**TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2018 PEJABAT ADMINISTRATOR (ESELON III)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas PM PTSP	1 Nilai Hasil Evaluasi AKIP 2 Prosentasi Temuan BPK / Inspektorat Yang Ditindaklanjuti	BB 100 %	Triwulan I - Triwulan I -		1 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2 Pelayanan Administrasi perkantoran 3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	5,532,000 611,947,000 24,800,000 91,450,000	1,200,000 110,676,862 4,200,000 -

PIHAK KEDUA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Hj. ELYANI YUSTIKA
NIP. 19660722 199303 2 006

Kandangan, 31 Maret 2018
PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS

Ir. KHAIRIADI
NIP. 19620320 199403 1 005

**TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2018 PEJABAT ADMINISTRATOR (ESELON III)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya nilai investasi penanaman modal	1 Jumlah investasi PMDN Jumlah investasi PMA	60 M 170 M	Triwulan I 32,8 Triwulan I -		1 Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1 Penyelenggaraan Pameran 2 Kajian potensi unggulan daerah dalam upaya sistem informasi penanaman modal	111,500,000 76,687,500	- -

PIHAK KEDUA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Hj. ELYANI YUSTIKA
NIP. 19660722 199303 2 006


Kandangan, 31 Maret 2018
PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL


MUZAKIR NASARUDDIN, ST
NIP. 19751103 200501 1 015


**TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2018 PEJABAT ADMINISTRATOR (ESELON III)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan	81	indeks	Triwulan I	88,64				
		2 Persentasi layanan izin tepat waktu sesuai Standart Operasional Procedure (SOP)	100	%	Triwulan I	100				
		3 Jumlah pemenuhan terhadap skor tingkat kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman	85	Nilai	Triwulan I	79				
2	Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu	4 Rata-rata hari proses perizinan	2	hari	Triwulan I	0,18				
		5 Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100	%	Triwulan I	100				
							1 Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1 Peningkatan sistem informasi pelayanan perizinan	244,522,500	94,500,000

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

 **Hj. ELYANI YUSTIKA**
NIP. 19660722 199303 2 006

Kandangan, 31 Maret 2018
PIHAK PERTAMA


ABDURRAHMAN ARRAHIMI, S.Pi
NIP. 19681117 199703 1 003

**TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2018 PEJABAT PENGAWAS (ESELON IV)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET		REALISASI CAPAIAN KINERJA		KET	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Terlaksananya administarsi umum dan kepegawaian	1 Jumlah administrasi kepegawaian diselesaikan tepat waktu	100	%	Triwulan I	17,86		1 Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 administrasi perkantoran	595.147.000	106.317.362
2	Peralatan dan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	2 Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	26	unit	Triwulan I	3			2 penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	13,550,000	4,000,000
		3 Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik	1	buah	Triwulan I	-		2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	91,450,000	-
3	Terpeliharanya Mobil Dinas Operasional	4 Kondisi Mobil Dinas Operasional laik jalan	1	buah	Triwulan I	1			4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	24,800,000	4,200,000
4	Terpenuhinya perizinan kendaraan dinas operasional	5 Kendaraan Dinas Operasional laik jalan	8	buah	Triwulan I	1		3 Pelayanan Administrasi Perkantoran	5 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	3,250,000	359,500

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Ir. KHAIRIADI
NIP. 19620320 199403 1 005


Kandangan, Maret 2018
PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN




Hj. MAYA CITERA DEWI, S.Sos
NIP. 19710202 199401 2 001

**TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2018 PEJABAT PENGAWAS (ESELON IV)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI CAPAIAN KINERJA		KET	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
1	Terlaksananya penata usahaaan administrasi perencanaan dan keuangan	1 Nilai hasil evaluasi AKIP 2 Laporan Keuangan diselesaikan tepat waktu 3 Temuan BPK Inspektorat yang ditindaklanjuti	BB 4 buah 100%	Triwulan I Triwulan I Triwulan I	 1		1 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5,532,000	1,200,000

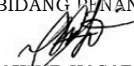
PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ir. KHAIRIADI
NIP. 19620320 199403 1 005

Kandangan, Maret 2018
PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Hj. ISNANIAH, S.Sos
NIP. 19700810 199203 2 005

**TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2018 PEJABAT PENGAWAS (ESELON IV)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI CAPAIAN KINERJA	KET	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terlaksananya kerjasama dibidang investasi	1 Jumlah izin prinsip/MoU bidang investasi yang ditindaklanjuti	15 MoU	Triwulan I -		1 Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1 Penyelenggaraan Pameran Investasi	111,550,000	-
2	Terjangkaunya layanan media informasi investasi	2 Jumlah media informasi investasi yang dapat diakses masyarakat	4 jenis	Triwulan I -					-

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL


MUZAKIR NASARUDDIN, ST
NIP. 19751103 200501 1 015


Kandangan, Maret 2018
PIHAK PERTAMA
KEPALA SEKSI PROMOSI DAN PENGEMBANGAN POTENSI INVESTASI


KUSBIONO JUMADI RAHMAN, S.Pt
NIP. 19780505 201001 1 021

**TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2018 PEJABAT PENGAWAS (ESELON IV)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI CAPAIAN KINERJA	KET	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tercapainya target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang investasi	81 indeks	Triwulan I 79,81		1 Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1 Kajian Potensi Unggulan Daerah dalam upaya sistem informasi penanaman modal	76,687,500	
2	Terlaksananya layanan izin investasi tepat waktu sesuai Standart Operasional Prosedure (SOP)	2 Persentase layanan izin investasi tepat waktu sesuai Standart Operasional Prosedure (SOP)	100 %	Triwulan I					
3	Terlaksananya pemenuhan terhadap skor kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman	3 Jumlah pemenuhan terhadap skor tingkat kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman	85 zona hijau	Triwulan I 79 (kuning)					
4	Terlaksananya kecepatan pelayanan perizinan penanaman modal	4 Rata-rata hari proses perizinan penanaman modal	2 hari	Triwulan I					
5	Terlaksananya pengaduan yang ditindak lanjuti	5 Persentase pengaduan investor yang ditindak lanjuti	100 %	Triwulan I -					

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL


MUZAKKIR NASARUDDIN, ST
NIP. 19751103 200501 1 015

Kandangan, Maret 2018
PIHAK PERTAMA
KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL


ROCHMAN BAGU JATMIKO, S.AP
NIP. 19791017 201001 1 019

**TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2018 PEJABAT PENGAWAS (ESELON IV)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI CAPAIAN KINERJA	KET	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tercapainya target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang pelayanan jasa usaha	81 indeks	Triwulan I 88,64		1 Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1 Pembangunan sistem informasi pelayanan perizinan	244.522.500	84.500.000
2	Terlaksananya perizinan jasa usaha tepat waktu sesuai standart Operasional Prosedure (SOP)	2 Persentasi perizinan Jasa Usaha yang dikeluarkan tepat waktu	100 %	Triwulan I 100					
3	Terlaksananya pemenuhan terhadap skor tingkat kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman	3 Jumlah pemenuhan terhadap skor tingkat kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman	81 zona hijau	Triwulan I 79 (kuning)					
4	Terlaksananya kecepatan pelayanan perizinan jasa usaha	4 Rata-rata hari proses perizinan jasa usaha	2 hari	Triwulan I 0,09					
5	Terlaksananya tindak lanjut perizinan yang masa berlakunya jatuh tempo	5 Persentasi tindak lanjut perizinan yang masa berlakunya jatuh tempo	100 %	Triwulan I 100					

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


ABDURRAHMAN ARRAHIMI, S.Pi
NIP. 19681117 199703 1 003

Kandangan, Maret 2018
PIHAK PERTAMA
KEPALA SEKSI PERIZINAN JASA USAHA


MISTAVIP RINA, B.Sc
NIP. 19650310 198803 2 007

**TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2018 PEJABAT PENGAWAS (ESELON IV)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET		REALISASI CAPAIAN KINERJA		KET	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Tercapainya target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perizinan	81	indeks	Triwulan I	88,64		1 Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1 Pembangunan sistem informasi pelayanan perizinan	244.522.500	84.500.000
2	Terlaksananya perizinan jasa usaha tepat waktu sesuai standart Operasional Prosedure (SOP)	2 Persentasi perizinan Jasa Tertentu yang dikeluarkan tepat waktu	100	%	Triwulan I	100					
3	Terlaksananya pemenuhan terhadap skor tingkat kepatuhan pelayanan publik versi ombudtsman	3 Jumlah pemenuhan terhadap skor tingkat kepatuhan pelayanan publik versi ombudtsman	81	zona hijau	Triwulan I	79 (kuning)					
4	Terlaksananya kecepatan pelayanan perizinan jasa usaha	4 Rata-rata hari proses perizinan jasa tertentu	2	hari	Triwulan I	0,27					
5	Terlaksananya tindak lanjut perizinan yang masa berlakunya jatuh tempo	5 Persentasi tindak lanjut perizinan yang masa berlakunya jatuh tempo	100	%	Triwulan I	100					

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


ABDURRAHMAN ARRAHIMI, S.Pi
NIP. 19681117 199703 1 003

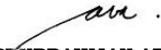
Kandangan, Maret 2018
PIHAK PERTAMA
KEPALA SEKSI PERIZINAN JASA TERTENTU


YURNIANTI, ST
NIP. 19810305 200604 2 011

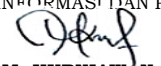
**TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2018 PEJABAT PENGAWAS (ESELON IV)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET		REALISASI CAPAIAN KINERJA		KET	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Terlaksananya pengaduan yang ditindaklanjuti	1 Persentasi pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100	%	Triwulan I	100		1 Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1 Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan	244,522,500	84,500,000
2	Terjangkaunya layanan media informasi perizinan yang dapat diakses masyarakat	2 Jumlah media informasi perizinan yang dapat diakses masyarakat	4	buah	Triwulan I	1					
3	Terlaksananya kepatuhan terhadap pelayanan publik versi ombudsman	3 Persentasi pemenuhan terhadap skor tingkat kepatuhan versi ombudsman	81	zona hijau	Triwulan I	79 (kuning)					

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


ABDURRAHMAN ARRAHIMI, S.Pi
NIP. 19681117 199703 1 003

Kandangan, Maret 2018
PIHAK PERTAMA
KEPALA SEKSI DATA INFORMASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT


M. KURNIAWAN, S.AP
NIP. 19760905 199803 1 001



**Laporan Capaian Tri Wulan II
Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Hulu Sungai Selatan
Tahun 2018**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Jl. Pangeran Antasari No. 1 Kandangan Kode Pos 71211
Telp. (0517)22852

KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat dan karunia Allah SWT semata maka kami dapat menyusun Laporan Capaian Kinerja Tri Wulan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Laporan ini merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan laporan kinerja ini merupakan analisis kinerja capaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Laporan Capaian Tri Wulan yang kami susun ini diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 dan dapat memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan kinerja yang lebih baik di tahun berikutnya.

Kandangan, Juni 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Hulu Sungai Selatan,



Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina Tk.I

NIP.19660722 199302 2006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.3. Isu Strategis	3
1.4. Dasar Hukum	3
II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Perencanaan Strategis	4
2.2. Indikator Kinerja Utama	7
2.3. Perjanjian Kinerja	7
III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama	9
3.2. Pengukuran	10
3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	13
3.4. Akuntabilitas Keuangan	14
IV. PENUTUP	16
LAMPIRAN : Laporan Capaian Triwulan II	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Atas dasar tekad dan semangat untuk perwujudan good governance itu maka beberapa tugas dan tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dirasakan semakin berat, karena aparatur daerah dituntut untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Dalam rangka pemenuhan atas tuntutan itu, maka diperlukan pengembangan dan penetapan sistem serta prosedur kerja yang cepat, tepat, jelas dan nyata serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga penyelenggaraan tugas-tugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan harus bisa berlangsung secara berdayaguna dan berhasil guna.

Selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan salah satu keberhasilan dalam melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tersebut maka disusun Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2018 yang didalamnya berisi konstelasi perencanaan strategik dan implementasinya serta tolok ukur keberhasilan berbagai indikator yang telah ditetapkan guna peningkatan dalam pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Harapan yang diinginkan dapat menjadi umpan balik dalam rangka pemicu perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan di tahun mendatang.

1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 72 Tahun 2016 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman Modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas.

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Perumusan Kebijakan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal serta pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu.
3. Pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal.
4. Koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian
5. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal.
6. Evaluasi dan pelaporan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem

informasi penanaman modal.

1.3 Isu Strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD, Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, implikasi RT/RW bagi pelayanan SKPD dan identifikasi masalah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai isu strategis yaitu sebagai berikut :

1. Tingkat investasi yang masih rendah;
2. Kurang puasnya masyarakat terhadap pelayanan perizinan;
3. Lamanya proses pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
4. Rendahnya akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Peraturan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12) ;
- e. Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja, suatu organisasi mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Di dalam suatu perencanaan strategis terdapat visi dan misi organisasi yang akan dicapai dalam suatu periode. Adapun visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut :

1) Visi

“Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif dengan Mengedepankan Pelayanan Prima Terpadu Satu Pintu”

2) Misi

1. Meningkatkan investasi penanaman modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
3. Meningkatkan kecepatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas PM PTSP.

3) Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dan pencapaian target - target ini merupakan ukuran keberhasilan kinerja suatu organisasi, adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan investasi penanaman modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- b. Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- c. Meningkatkan kecepatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- d. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas PM PTSP.

b. Sasaran

Adapun sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur sebagaimana penjabaran berikut :

- a. Meningkatnya investasi penanaman modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. Meningkatnya kepuasan masyarakat pada pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- c. Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- d. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PM PTSP.

Hubungan antara tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Hubungan Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN
1	2	3	4
1	Meningkatkan investasi di Kab. Hulu Sungai Selatan	Meningkatnya investasi di Kab. Hulu Sungai Selatan	Jumlah investasi penanaman modal di Kab. Hulu Sungai Selatan

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN
1	2	3	4
2	Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu satu pintu	Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu satu pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan perizinan. Persentase layanan izin tepat waktu sesuai Standar Operasional Procedure (SOP) Jumlah pemenuhan terhadap skor tingkat kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman.
3	Meningkatkan kecepatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu	Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu	Rata-rata hari penyelesaian perizinan. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
4	Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas PM PTSP	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas PM PTSP	Nilai hasil evaluasi AKIP. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti.

4) Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran, terdiri dari kegiatan :
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - Penyebarluasan informasi tugas pokok dan fungsi SKPD
 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - Penyediaan alat tulis kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyediaan makanan dan minuman
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis lainnya
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari kegiatan :
 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari kegiatan :
 - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi :

- Penyelenggaraan Pameran Investasi

Pembangunan system informasi pelayanan perizinan

Kajian potensi unggulan daerah dalam upaya sistem iformasi

Penanaman Modal

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra. Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan Pemilihan Indikator	Formulasi / Penjelasan	Penanggung jawab	Sumber Data						
1	2	3	4	5	6	7						
1	Meningkatnya Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Jumlah Investasi Penanaman Modal di Kab. HSS	saat ini tingkat investasi di Kab. HSS masih rendah (th 2015 persentase peningkatan investasi tercatat 0,23%) hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain kurangnya promosi keunggulan daerah, potensi keunggulan yang ada masih bersifat komparatif	jumlah investasi penanaman modal	Bidang PM							
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu satu pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang pelayanan peizinan	Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan di samping data IKM akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan perizinan yg masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan.	<p>Hasil survey IKM satu tahun yang diikuti minimal 50% penerima layanan dengan membandingkan total dari nilai persepsi per variable dengan total pariable yg terisi dikalikan dengan nilai penimbang. Terdapat 9 variable sesuai acuan KEP MENPAN No : 14 Tahun 2016.</p> <p>UNSUR PELAYANAN</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Pelayanan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kemudahan prosedur pelayanan</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kecepatan waktu pelayanan</td> </tr> </table>	1	Pelayanan	2	Kemudahan prosedur pelayanan	3	Kecepatan waktu pelayanan	Bidang PTSP	
1	Pelayanan											
2	Kemudahan prosedur pelayanan											
3	Kecepatan waktu pelayanan											

				4	Kesesuaian biaya pelayanan		
				5	Kepastian produk layanan		
				6	Kompetensi petugas layanan		
				7	Perilaku petugas layanan		
				8	Kejelasan maklumat pelayanan		
				9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan pelayanan		
		Persentase layanan izin tepat waktu sesuai Standart Operasional Procedure (SOP)	izin yang dikeluarkan sesuai (SOP)	Jumlah izn sesuai SOP : jenis Izin x 100		Bidang PTSP	Bidang PTSP
			No	Jenis izin	waktu penyel esaian (hari)		
			1	Izin Usaha Industri (IUI)	1		
			2	Izin Usaha Perdagangan (IUP)	1		
			3	Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)	1		
			4	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	1		
			5	Izin Optikal	2		
			6	Izin Balai Pengobatan	2		
			7	Izin Balai Kesehatan Ibu dan Anak	3		
			8	Izin Apotik	2		
			9	Izin Toko Obat	3		
			10	Izin Operasional Rumah Sakit Bersalin	3		

			11	Izin Usaha Jasa Konstruksi	2			
			12	Izin Usaha Toko Modern	2			
			13	Izin Lokasi	3			
			14	izin domisili	1			
			15	izin gangguan perdagangan	1			
			16	izin gangguan industri	2			
			17	izin gangguan pengolahan makanan dan minuman	2			
			18	izin gangguan praktek dokter	2			
			19	izin gangguan praktek dokter spesialis	2			
			20	izin gangguan praktek dokter gigi	2			
			21	izin gangguan praktek dokter gigi spesialis	2			
			22	izin gangguan praktek bidan mandiri	2			
			23	izin gangguan praktek perawat	2			
			24	izin gangguan apotek	2			
			25	izin gangguan toko obat	2			
			26	izin gangguan optikal	2			
			27	izin gangguan rumah sakit swasta	2			
			28	izin gangguan balai pengobatan/ klinik pengobatan	2			
			29	izin gangguan balai pengobatan kesejahteraan ibu dan anak	2			

			30	izin gangguan laboratorium sederhana	2			
			31	izin gangguan pengobatan tradisional	2			
			32	izin gangguan warnet	2			
			33	izin gangguan game online	1			
			34	izin gangguan rumah makan	2			
			35	izin gangguan warung makan	2			
			36	izin gangguan restoran	1			
			37	izin gangguan kafe	2			
			38	izin gangguan salon kecantikan	2			
			39	izin gangguan tempat olahraga	2			
			40	izin gangguan pusat pelatihan / kursus	2			
			41	izin gangguan biro perjalanan	2			
			42	izin gangguan hotel	2			
			43	izin gangguan penginapan/home stay	2			
			44	izin gangguan pangkalan LPG	2			
			45	izin gangguan minyak tanah	2			
			46	izin gangguan rumah parkir	2			
			47	izin gangguan las	2			
			48	izin gangguan bengkel dan servis kendaraan	1			
			49	izin gangguan TV kabel	1			
			50	izin trayek	3			

			51	izin mendirikan bangunan	7			
			52	izin pemasangan reklame	2			
		Jumlah pemenuhan terhadap skor tingkat kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman	Nilai kepatuhan terhadap pelayanan publik versi ombudsman ada 9 kriteria, terpenuhinya nilai tersebut menunjukkan bahwa kinerja Dinas PM PTSP sesuai dengan yang diharapkan masyarakat terutama dari sarana dan prasaran yang tersedia.			Peraturan Ombudsman RI No. 17 tahun 2015 tentang penelitian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik		
			NO	Periabel Penilaian	Kateg ori	Komponen Indikator	Bobot	
			1	Standar Pelayanan	Utama	Persyaratan	6,0	
		Sistem mekanisme dan prosedur				6,0		
		Produk pelayanan				6,0		
		Jangka waktu penyelesaian				12,0		
			2	Maklumat Layanan	Utama	Ketersediaan Maklumat Pelayanan	12,0	
			3	Sistem Informasi Pelayanan	Utama	Ketersediaan informasi Pelayanan Publik Elektronik atau Nonelektronik (booklet,pamflet, website,monitor, televisi,dll)	12,0	
			4	Sarana dan Prasarana Fasilitas	Utama	Ketersediaan ruang tunggu	3,0	
		Ketersediaan toilet untuk pengguna layanan				2,0		
		Ketersediaan loket/meja pelayanan				3,0		

				5	Pelayanan Khusus	Utama	Ketersediaan sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus pemandu,toilet khusus,ruang menyusui dll	2,0		
				6	Pengelolaan pengaduan	Utama	Ketersediaan pelayanan khusus bagi pengguna layanan	2,0		
							Ketersediaan sarana pengaduan (sms/telpon/fax/ email,dll)	5,0		
							Ketersediaan informasi prosedur dan tatacara penyampaian	3,0		
							Ketersediaan pejabat/petugas pengelola pengaduan	5,0		
				7	Penilaian kinerja	Utama	Ketersediaan sarana pengukuran kepuasan pelanggan	2,5		
				8	Visi,Misi dan Metro Pelayanan	Tambahan	Ketersediaan Visi dan Misi Pelayanan	2,0		
							Ketersediaan Motto Pelayanan	2,0		
				9	Atribut	Tambahan	Ketersediaan Petugas penyelenggara menggunakan ID Card	2,5		
<p>Hasil penilaian kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, dengan nilai dan kategorisasi sebagai berikut</p>										

				a. Nilai 81 s.d 100 zona hijau dengan predikat Kepatuhan Tinggi		
				b. Nilai 51 s.d 80 zona kuning dengan predikat kepatuan sedang		
				c. Nilai 0 s.d 50 zona merah dengan predikat kepatuhan rendah		
3	Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu	Rata-rata hari proses perizinan	Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan menunjukkan bahwa ada peningkatan kinerja dari seluruh SDM yang ada di Dinas PM PTSP	jumlah hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan izin : jumlah izin yang terbit	Bidang PTSP	Bidang PTSP
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	Jumlah pengaduan masyarakat yang di selesaikan atau ditindak lanjuti	jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti : jumlah pengaduan yang masuk x 100	Bidang PTSP	Bidang PTSP
4	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas PM PTSP	Nilai evaluasi AKIP	sebagai salah satu hasil kinerja SKPD	nilai evaluasi Inspektorat	Sekretariat Dinas PM PTSP	Sekretariat Dinas PM PTSP
		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti	Dalam rangka pembenahan administrasi program dan keuangan pada SKPD	temuan BPK/ Inspektorat yang ditindak lanjuti	Sekretariat Dinas PM PTSP	Sekretariat Dinas PM PTSP

Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Berdasarkan perencanaan strategis terkait sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang harus dicapai, maka pada Tahun 2018 target pencapaian kinerja yang ingin dicapai sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya investasi penanaman modal di Kab.HSS	Persentase Jumlah Investasi Penanaman Modal di Kab. HSS	230M	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Penyelenggaraan Pameran Investasi	111.550.000,00
					Kajian Potensi Unggulan Daerah dalam Upaya Sistem Informasi Penanaman Modal	76.687.500,00
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu satu pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang pelayanan perizinan	81			Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan
		Persentase layanan izin tepat waktu sesuai Standart Operasional Prosedure (SOP)	100%			
		Jumlah pemenuhan terhadap Skor tingkat kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman	85 (zona hijau)			

3	Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu	Rata-rata hari proses perizinan	2 Hari			
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%			
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas PM PTSP	Nilai Hasil evaluasi AKIP	BB	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5,832,000.00
		Prosentasi Temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%			
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	830,485,000.00
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	53,950,000.00
				Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	24,800,000.00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan tahapan capaian kinerja Triwulan II Tahun 2018 disusun dengan mengukur capaian kinerja atas sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja ini. Metode pengukuran yang dilaksanakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi, serta tindakan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang (*performance improvement*). Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi telah mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam mengukur keberhasilan kinerja sasaran, indikator yang dipakai dapat berupa indikator absolut di mana indikator tersebut melekat pada masing-masing kegiatan yaitu : indikator kinerja *input*, indikator kinerja *output* dan indikator kinerja *outcome*, atau merupakan dampak makro (*outcomes, benefit, impact*) dari beberapa kegiatan yang dilakukan. Capaian kinerja sasaran diukur dengan membandingkan capaian kinerja *outcome* yang dihasilkan dengan rencana pada masing-masing kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja indikator sasaran.

Indikator kinerja *input* terdiri dari besarnya dana yang digunakan dan pemakaian SDM. Indikator kinerja *output* berupa hasil yang diperoleh begitu kegiatan selesai dilaksanakan. Sedangkan indikator kinerja *outcome* berupa manfaat yang diperoleh dari berfungsinya output yang dapat di ukur dalam jangka pendek.

1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) cenderung lebih dititikberatkan sejauh mana program dan kegiatan telah membawa manfaat bagi masyarakat, Pemerintah maupun *stakeholder* lainnya, dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat pencapaian IKU pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Hulu Sungai Selatan Triwulan I Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian IKU Pada Triwulan II Tahun Anggaran 2018

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI	CAPAIAN
1	Jumlah investasi penanaman modal di Kab. HSS	M	60 (PMDN)	35,5	15,43%
			130 (PMA)	-	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)bidang pelayanan perizinan.	Indeks	81	88,64	88,64
3	Persentase layanan izin tepat waktu sesuai standar operasional procedure (SOP)	%	100	100	100
4	Jumlah pemenuhan skor tingkat kepatuhan pelayanan public versi ombustman	Nilai	85 (zona hijau)	79 (zona kuning)	79 (zona kuning)
5	Rata-rata hari proses perizinan.	Hari	2 hari	0,18 Hari	0,18 hari
6	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti.	%	100	100	100
7	Nilai hasil evaluasi AKIP	Kriteria	BB	-	-
8	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	100	-	-

1.2 Pengukuran

Tabel 3.2
Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator Kinerja Utama	Perhitungan Indikator	Formulasi
1	Jumlah investasi penanaman modal di Kab. HSS	<p><i>Makna Indikator :</i> Di Kab. HSS investasi PM sangat rendah.</p> <p><i>Alasan Pemilihan Indikator :</i> Tingkat investasi di Kab. HSS pada tahun 2015 tercatat 0,23 % Adapun penyebabnya antara lain Kurangnya promosi keunggulan daerah, potensi keunggulan yang ada masih bersifat komparatif.</p> <p><i>Cara Perhitungan :</i> Jumlah investasi penanaman modal.</p>	
2	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) bidang pelayanan perizinan.	<p><i>Makna Indikator :</i> Dinas PM PTSP kualitas pelayanan perizinan masih perlu perbaikan.</p> <p><i>Alasan Pemilihan Indikator :</i> Sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan perizinan perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk menilai guna mendorong perbaikan kualitas pelayanan.</p> <p><i>Cara Perhitungan :</i> Hasil survey IKM 1 tahun yang diikuti minimal 50 % penerima layanan dengan membandingkan total dari nilai persepsi per variable dengan total variable yang terisi X nilai penimbang 9 (Sembilan) variable sesuai KEP MENPAN No.14 Th 2016</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan 2. Kemudahan prosedur pelayanan 3. Kecepatan waktu pelayanan 4. Kesesuaian biaya pelayanan 5. Kepastian produk layanan 6. Kompetensi petugas layanan 7. Perilaku petugas layanan 8. Kejelasan maklumat pelayanan 9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan pelayanan. 	

3	Persentase layanan izin tepat waktu sesuai SOP	<p><i>Makna Indikator :</i> Penyelesaian perizinan tepat waktu dan sesuai SOP. <i>Alasan Pemilihan Indikator :</i> Waktu penyelesaian izin yang dikeluarkan sesuai SOP = 100%. <i>Cara Perhitungan :</i> $\frac{\sum \text{Izin sesuai SOP}}{\text{Jenis izin}} \times 100 \%$</p>	
4	Jumlah pemenuhan terhadap skor tingkat kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman	<p><i>Makna Indikator :</i> Dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat bahwa kinerja Dinas PM PTSP agar mematuhi peraturan ombostmen. <i>Alasan Pemilihan Indikator :</i> Nilai kepatuhan terhadap pelayanan publik versi ombustman agar terpenuhi harapan masyarakat terutama sarana dan prasarana. <i>Cara Perhitungan :</i> Peraturan Ombostman RI No. 17 tahun 2015 tentang penelitian kepatuhan terhadap standar.; Dari hasil 9 kriteria hasil penilaian kepatuhan pada pasal 12 dengan nilai dan kategori sbb a. Nilai 81s.d 100 zona hijau, Predikat kepatuhan tinggi b. Nilai 51 s.d 80zona kuning, Predikat kepatuhan sedang c. Nilai 0 s.d 50 zona merah, Predikat kepatuhan rendah.</p>	
5	Rata-rata hari proses perizinan.	<p><i>Makna Indikator :</i> Permasalahan isu strategis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi adalah kurang cepatnya penyelesaian izin. <i>Alasan Pemilihan Indikator :</i> Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan menunjukkan adanya peningkatan kinerja dari seluruh SDM yang ada di Dinas PM PTSP. <i>Cara Perhitungan :</i> $\frac{\sum \text{hari yg dibutuhkan}}{\sum \text{izin yg diterbitkan}} \times \text{Penyelesaian izin}$</p>	
6	1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	<p><i>Makna Indikator :</i> Setiap pengaduan yang disampaikan akan berdampak terhadap perbaikan pelayanan. <i>Alasan Pemilihan Indikator :</i> Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan atau ditindaklanjuti.</p>	

		<i>Cara Perhitungan :</i> $\frac{\sum \text{Pengaduan yg d TLx}}{\sum \text{Pengaduan yg masuk}} \times 100 \%$	
7	1. Nilai hasil Evaluasi AKIP	<i>Makna Indikator :</i> Dinas PM PTSP pada tatanan akuntabilitas kinerja masih rendah. <i>Alasan Pemilihan Indikator :</i> Sebagai salah satu hasil kinerja OPD. <i>Cara Perhitungan :</i> Hasil evaluasi Inspektorat.	
8	2. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak Lanjuti.	<i>Makna Indikator:</i> OPD bertanggungjawab atas temuan yang menimbulkan kerugian Negara dan menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi tepat waktu. <i>Alasan Pemilihan Indikator :</i> Dalam rangka pembenahan administrasi program dan keuangan pada OPD <i>Cara Perhitungan :</i> Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti.	

1.3 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan formulir tahapan capaian Perjanjian Kinerja (PK) Triwulan II Tahun 2018, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Namun pengukuran itu saja tidak cukup tanpa tahu apa deskripsi dari semua kondisi itu, kondisi-kondisi tersebut perlu dianalisis dari pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan agar dapat diketahui hubungan permasalahannya untuk diidentifikasi sebagai sebab akibat berupa faktor-faktor yang mempengaruhinya, mana yang menjadi hambatan dan kendala untuk dijadikan *feed back* bagi

perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada putaran atau periode waktu berikutnya.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Triwulan II Tahun Anggaran 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

1.) **SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatkan investasi penanaman modal di Kab.HSS**

Tabel 3.3

Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2018	Realisasi TW II	Capaian Kinerja %	Catatan
1	Jumlah investasi penanaman modal di Kab. HSS	M	60 (PMDN)	35,5	15,43	
			130 (PMA)	-		

Pencapaian sasaran strategis II yaitu meningkatnya investaasi penanaman modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilihat dari indikator kinerja sasaran jumlah investasi penanaman modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Jumlah investasi penanaman modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada triwulan II adalah sebesar Rp.35,5M, capaian tersebut diperoleh dari Penanaman Modal Dalam Daerah (PMDN).

Tabel 3.4

**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1
Dibandingkan dengan Target Tahun 2018**

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET THN 2018	REALISASI TW II	CAPAIAN KINERJA
Jumlah investasi penanaman modal di Kab. HSS	M	230	35,5	Belum tercapai

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja pada sasaran 1 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.5

Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 1

Sasaran	Indikator Kegiatan	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Meningkatnya investasi penanaman modal di Kab.HSS		<i>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investas</i>		
	Jumlah investasi penanaman modal di Kab. HSS	- Penyelenggaraan pameran investasi	111.550.000	83.544.400
		- Kajian potensi unggulan daerah dalam upaya system informasi penanaman modal	76.687.500	-
J U M L A H			192.237.500	83.524.400

2.) **SASARAN STRATEGIS 2** **Meningkatnya kepuasan masyarakat pada pelayanan perizinan terpadu .satu pintu.**

Tabel 3.6

Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2018	Realisasi TW II	Capaian Kinerja %	Catatan
1	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) bidang pelayanan perizinan	Indeks	81	88,64	88,64	Tercapai
2	Persentase layanan izin tepat waktu sesuai SOP	%	100	100	100	Tercapai

3	Jumlah pemenuhan terhadap skor tingkat kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman	Nilai	85 (zona hijau)	79 (kuning)		Belum Tercapai
---	---	-------	-----------------	-------------	--	----------------

Pencapaian sasaran strategis 2 yaitu Meningkatnya kepuasan masyarakat pada pelayanan perizinan terpadu satu pintu dilihat dari 3 indikator kinerja sasaran yaitu:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang pelayanan perizinan.

- Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan perizinan pada triwulan II 88,64 angka ini diperoleh dari hasil survey IKM satu tahun yang lalu yang diambil dari 50 % penerima layanan.

2. Persentase layanan izin tepat waktu sesuai SOP

- Persentase layanan izin tepat waktu sesuai Standar Operasional Prosedur pada triwulan II ini sebesar 100 % karena jumlah izin yang masuk sesuai dengan jumlah izin yang diterbitkan (untuk yang memerlukan rekomendasi dinas teknis diluar SOP/SOP tersendiri dari dinas teknis)

3. Jumlah pemenuhan terhadap skor tingkat kepatuhan pelayanan public versi ombudsman.

- Jumlah pemenuhan terhadap skor tingkat kepatuhan pelayanan publik versi ombustman pada triwulan II masuk kategori zona kuning yaitu 79 hal ini disebabkan salah satu komponen indikator yang belum terpenuhi yaitu ketersediaan sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus pemandu.

Tabel 3.7

**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2
Dibandingkan dengan Target Tahun 2018**

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET THN 2018	REALISASI TW II	CAPAIAN KINERJA
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang pelayanan perizinan	%	81	88,64	Tercapai
Persentasi layanan izin tepat waktu sesuai Standart Operasional Procedure (SOP)	%	100	100	Tercapai

Jumlah pemenuhan terhadap Skor tingkat kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman	nilai	85	79 (kuning)	Belum tercapai

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja pada sasaran 2 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.8

Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 2

Sasaran	Indikator Kegiatan	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Meningkatnya kepuasan masyarakat pada pelayanan perizinan terpadu satu pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang pelayanan perizinan	<i>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investas</i>		
	Persentasi layanan izin tepat waktu sesuai Standart Operasional Prosedure (SOP)	- Pembangunan system informasi pelayanan perizinan	244.522.500	123.800.000
	Jumlah pemenuhan terhadap Skor tingkat kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman			
J U M L A H			244.522.500	123.800.000

3.) **SASARAN STRATEGIS 3** **Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu**

Tabel 3.9

Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2018	Realisasi TW II	Capaian Kinerja %	Catatan
1	Rata-rata hari proses perizinan.	hari	2	0,18	0,18	Tercapai
2	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	%	100	100	100	Tercapai

Pencapaian sasaran strategis 3 yaitu Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dilihat dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Rata rata hari proses perizinan
 - Rata-rata hari proses perizinan pada triwulan II 0,18 hal ini dikarenakan meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan dengan menggunakan system pelayanan perizinan secara online.
2. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
 - Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti pada triwulan II 100% dikarenakan jumlah pengaduan yang diterima dapat diselesaikan dan ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.

- **Tabel 3.10**

**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3
Dibandingkan dengan Target Tahun 2018**

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET THN 2018	REALISASI TW II	CAPAIAN KINERJA
Rata-rata hari proses perizinan.	Hari	2	0,18	tercapai
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	%	100	100	tercapai

Tabel 3.11

Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 3

Sasaran	Indikator Kegiatan	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu	Rata-rata hari proses perizinan.	<i>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investas</i>		
	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.			
J U M L A H				

6.) **SASARAN STRATEGIS 4** Meningkatkan akuntabilitas kinerja

Tabel 3.12

Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2018	Realisasi TW II	Capaian Kinerja %	Catatan
1	Indikator nilai hasil evaluasi AKIP	Nilai	BB	0	0	
2	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	100	-	-	

Pencapaian sasaran strategis 4 yaitu Meningkatkan akuntabilitas kinerja dilihat dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Indikator nilai hasil evaluasi AKIP

Nilai hasil evaluasi AKIP SKPD menjadi indikator yang cukup menentukan terhadap kualitas kinerja SKPD, karena semakin baik nilai evaluasi AKIP SKPD menunjukkan bahwa pola manajemen dalam suatu organisasi telah berjalan dengan baik dari mulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dimana seluruh unsur tersebut menentukan tingkat keberhasilan SKPD dalam mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi AKIP SKPD setiap tahunnya dilaksanakan oleh Inspektorat Kab.HSS Target nilai evaluasi AKIP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. HSS yang ditetapkan pada Tahun 2018 kategori BB.

Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya nilai evaluasi AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kab. HSS akan terus meningkat sehingga dapat menunjang nilai evaluasi AKIP Pemerintah Kab. HSS untuk memperoleh nilai A.

2. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

Temuan atas hasil pemeriksaan BPK atas laporan pertanggungjawaban keuangan harus selalu ditindaklanjuti sehingga target yang ditetapkan untuk indikator ini harus 100%.

Selain persentase tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK, diharapkan jumlah temuan dari hasil pemeriksaan tersebut setiap tahun mengalami pengurangan atau bahkan tidak ada sehingga dapat predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Kab. HSS dapat diperoleh.

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4
Dibandingkan dengan Target Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET THN 2018	REALISASI TW II	CAPAIAN KINERJA
Indikator nilai hasil evaluasi AKIP	Nilai	BB	-	-
Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	100	-	-

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja pada sasaran 4 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.32
Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 4

Sasaran	Indikator Kegiatan	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai hasil evaluasi AKIP	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5,532,000	2.500.000
	Jumlah Laporan Keuangan diselesaikan tepat waktu			
	temuan BPK /inspektorat yang ditindaklanjuti			
	Jumlah administrasi kepegawaian diselesaikan tepat waktu	Pelayanan Administrasi Perkantoran	595.147.000	301.910.796
	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik		13.550,000	5.600.000
	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	91.450,000	89.481.000

	Kondisi Mobil Dinas Operasional laik jalan	Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.250,000	504.500
	Kendaraan Dinas Operasional laik jalan		24.800.000	8.210.000
J U M L A H			733.729.000	408.206.296

1.4 Akuntabilitas Keuangan

Pada bagian ini akan diuraikan pagu anggaran dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. Di dalamnya terdapat alokasi anggaran, realisasi keuangan, persentasi capaian dan sisa anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan Triwulan II Tahun Anggaran 2018 yang diambil dari Laporan Fisik dan Keuangan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.33

**Alokasi dan Realisasi Keuangan
Triwulan II Tahun 2018**

Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi
2	3	4
<i>Program Pelayanan Administrasi dan Perkantoran</i>	<i>611.947.000</i>	<i>308.015.296</i>
Penyediaan jasa surat menyurat	3.200.000	1.031.500
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	78.000.000	51.344.460
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.250.000	504.500
Penyebarluasan informasi tugas pokok dan fungsi SKPD	11.000.000	-
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	13.550.000	5.600.000
Penyediaan alat tulis kantor	37.314.750	18.625.900
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.940.000	8.316.600
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.948.750	-
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	149.843.500	54.480.500
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.400.000	1.190.000

Penyediaan makanan dan minuman	11.600.000	1.200.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	225.000.000	137.938.990
Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis lainnya	29.400.000	15.841.846
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	22.500.000	12.040.000
<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apatur</i>	<i>116.250.000</i>	<i>97.691.000</i>
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	91.450.000	89.481.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	24.800.000	8.210.000
<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	<i>5.832.000</i>	<i>2.500.000</i>
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.832.000	2.500.000
<i>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</i>	<i>432.760.000</i>	<i>207.324.400</i>
Penyelenggaraan pameran investasi	111.550.000	83.524.400
Pembangunan system informasi pelayanan perizinan	244.522.500	123.800.000
Kajian potensi unggulan daerah dalam upaya system informasi penanaman modal	76.687.500,-	-
JUMLAH	1.166.489.000	615.530.696

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penyerapan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Triwulan II Rp. 615.530.696,00 atau 52,77 %.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 sebagai bentuk pertanggung jawaban dari rangkaian rencana kerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja sebagai wujud visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan pelaksanaan Tahun 2018 yang dapat mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari sasaran yang ditetapkan.

Adapun masalah ataupun hambatan yang dijumpai antara lain :

- a. Kurangnya/keterbatasan jumlah sumberdaya manusia.
- b. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan perizinan.
- c. Masih belum terkoordinasinya data tentang inventarisasi pelayanan perizinan
- d. Kurangnya kemampuan dalam mengkoordinir dinas/instansi terkait.

Upaya untuk mengatasi permasalahan/hambatan tersebut dilakukan antara lain melalui :

- a. Sudah diupayakan untuk penambahan sumberdaya aparatur pada masing- masing bidang.
- b. Telah diupayakan kegiatan pengadaan sarana komputer pada Tahun 2018 untuk menunjang kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- c. Telah diupayakan untuk memintadata -data tentang perizinan dari Instansi yang berkaitan.
- d. Telah diupayakan untuk melakukan pertemuan dalam Rapat teknis perizinan

Demikian Laporan Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018, selanjutnya laporan ini dapat dijadikan bahan untuk peningkatan dan penyempurnaan layanan yang berkepentingan.

Kandangan, Juni 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Hulu Sungai Selatan,



Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina Tk.I

NP.196607221993022006

**TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2018 PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Meningkatnya investasi penanaman modal di Kab.HSS	1 Jumlah Investasi Penanaman Modal di Kab. HSS	230	M	Triwulan I	35,5		Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Penyelenggaraan Pameran dan Investasi	111,550,000	83,524,400
									Kajian potensi unggulan daerah dalam upaya sistem informasi penanaman modal	76,687,500	-
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu satu pintu	2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang pelayanan perizinan	81	indeks	Triwulan I	88,64					
		3 Persentasi layanan izin tepat waktu sesuai Standart Operasional Prosedure (SOP)	100	%	Triwulan I	100					
		4 Jumlah pemenuhan terhadap Skor tingkat kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman	85	zona hijau	Triwulan I	79					
3	Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu	5 Rata-rata hari proses perizinan	2	hari	Triwulan I	0,18					
		6 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	%	Triwulan I	100					
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas PM PTSP	7 Nilai Hasil evaluasi AKIP	BB	Kriteria	Triwulan I	-		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5,532,000	2,500,000
		8 Prosentasi Temuan BPK / Inspektorat Yang Ditindaklanjuti	100	%	Triwulan I	-		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Administrasi Perkantoran	611,947,000	110,676,862
							Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		91,450,000	89,481,000
								Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional		24,800,000	8,210,000

Kandangan, Juni 2018



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
I. E. ELYANI YUSTIKA
NIP. 19660722 199303 2 006

**TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2018 PEJABAT ADMINISTRATOR (ESELON III)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas PM PTSP	1 Nilai Hasil Evaluasi AKIP 2 Prosentasi Temuan BPK / Inspektorat Yang Ditindaklanjuti	BB 100 %	Triwulan I - Triwulan I -		1 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2 Pelayanan Administrasi perkantoran 3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	5,532,000 611,947,000 24,800,000 91,450,000	2,500,000 110,676,862 8,210,000 89,481,000

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA
NIP. 19660722 199303 2 006

Kandangan, Juni 2018
PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS



Ir. KHAIRIADI
NIP. 19620320 199403 1 005


**TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2018 PEJABAT ADMINISTRATOR (ESELON III)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya nilai investasi penanaman modal	1 Jumlah investasi PMDN Jumlah investasi PMA	60 M 170 M	Triwulan I 35,5 Triwulan I -		1 Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1 Penyelenggaraan Pameran 2 Kajian potensi unggulan daerah dalam upaya sistem informasi penanaman modal	111,550,000 76,687,500	83,524,400 -

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN


Hj. ELYANI YUSTIKA
NIP. 19660722 199303 2 006

Kandangan, Juni 2018
PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL


MUZAKIR NASARUDDIN, ST
NIP. 19751103 200501 1 015

**TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2018 PEJABAT ADMINISTRATOR (ESELON III)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan	81	indeks	Triwulan I	88,64				
		2 Persentasi layanan izin tepat waktu sesuai Standart Operasional Procedure (SOP)	100	%	Triwulan I	100				
		3 Jumlah pemenuhan terhadap skor tingkat kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman	85	Nilai	Triwulan I	79				
2	Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu	4 Rata-rata hari proses perizinan	2	hari	Triwulan I	0,18				
		5 Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100	%	Triwulan I	100				
							1 Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1 Pembangunan sistem informasi pelayanan perizinan	244.522.500	123,800,000

PIHAK KEDUA
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



ELYANI YUSTIKA
NIP. 19660722 199303 2 006

Kandangan, Juni 2018
PIHAK PERTAMA



ABDURRAHMAN ARRAHIMI, S.Pi
NIP. 19681117 199703 1 003

**TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2018 PEJABAT ADMINISTRATOR (ESELON III)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas PM PTSP	1 Nilai Hasil Evaluasi AKIP 2 Prosentasi Temuan BPK / Inspektorat Yang Ditindaklanjuti	BB 100 %	Triwulan I - Triwulan I -		1 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2 Pelayanan Administrasi perkantoran 3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	5,532,000 611,947,000 24,800,000 91,450,000	2,500,000 110,676,862 8,210,000 89,481,000

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA
NIP. 19660722 199303 2 006


Kandangan, Juni 2018
PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS

Ir. KHAIRIADI
NIP. 19620320 199403 1 005


**TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2018 PEJABAT ADMINISTRATOR (ESELON III)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya nilai investasi penanaman modal	1 Jumlah investasi PMDN Jumlah investasi PMA	60 M 170 M	Triwulan I 35,5 Triwulan I -		1 Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1 Penyelenggaraan Pameran 2 Kajian potensi unggulan daerah dalam upaya sistem informasi penanaman modal	111,550,000 76,687,500	83,524,400 -

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN


Hj. ELYANI YUSTIKA
NIP. 19660722 199303 2 006

Kandangan, Juni 2018
PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL


MUZAKIR NASARUDDIN, ST
NIP. 19751103 200501 1 015

**TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2018 PEJABAT ADMINISTRATOR (ESELON III)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan	81	indeks	Triwulan I	88,64				
		2 Persentasi layanan izin tepat waktu sesuai Standart Operasional Procedure (SOP)	100	%	Triwulan I	100				
		3 Jumlah pemenuhan terhadap skor tingkat kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman	85	Nilai	Triwulan I	79				
2	Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu	4 Rata-rata hari proses perizinan	2	hari	Triwulan I	0,18				
		5 Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100	%	Triwulan I	100				
							1 Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1 Pembangunan sistem informasi pelayanan perizinan	244.522.500	123,800,000

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



ELYANI YUSTIKA
NIP. 19660722 199303 2 006

Kandangan, Juni 2018
PIHAK PERTAMA



ABDURRAHMAN ARRAHIMI, S.Pi
NIP. 19681117 199703 1 003